E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4636-4647
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Evaluasi Kesesuaian Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Dengan Program Prioritas Pendidikan Daerah Melalui Program Sleman Pintar

Ilham Firdaus Pranoto[1], Taniya Sahisnu Sufisyar[2], Revienda Anita Fitrie[3], Eva Hany Fanida[4]

[1,2,3,4] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
e-mail: 25040674074@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674084@mhs.unesa.ac.id[2], reviendafitrie@unesa.ac.id[3], evafanida@unesa.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan program prioritas pendidikan daerah, yaitu Program Sleman Pintar. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan miskin, dengan semangat "Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah, meliputi RLPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, serta publikasi resmi terkait pelaksanaan Program Sleman Pintar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman relatif besar dan konsisten, namun kesesuaiannya dengan Program Sleman Pintar masih bersifat parsial. Dinas Pendidikan telah mendukung akses pendidikan bagi peserta didik miskin melalui bantuan sosial pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal. Namun, fokus utama Program Sleman Pintar yang menitikberatkan pada pendidikan tinggi lebih banyak diwujudkan melalui skema beasiswa lintas perangkat daerah, terutama melalui Dinas Sosial. Oleh karena itu, alokasi anggaran Dinas Pendidikan dapat dinilai cukup sesuai dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama program, yaitu memastikan setiap keluarga miskin memiliki setidaknya satu anggota yang berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar sarjana.

Kata Kunci: Evaluasi Anggaran, Prioritas Pendidikan Daerah, Dinas Pendidikan, Akses Pendidikan, Beasiswa.

Abstract

This study aims to integrate the budget allocation of the Sleman Regency Education Office with priority regional education programs, specifically the Sleman Pintar Program. This program is a manifestation of the Sleman Regency Government's commitment to expanding inclusive and equitable access to education, especially for poor and vulnerable families, with the spirit of "One Poor Family, One Graduate." The study used a qualitative approach with a descriptive evaluative design. Data were collected through a documentation study of official government documents, including the Sleman Regency RLPPD for Fiscal Years 2023, 2024, and 2025, the 2024 Regional Government Financial Report, Sleman Regent Regulation Number 97 of 2024 concerning the Description of the Regional Budget for Fiscal Year 2025, and official publications regarding the implementation of the Sleman Pintar Program. The results of the study indicate that the education budget allocation in Sleman Regency is relatively large and consistent, but its alignment with the Sleman Pintar Program is still partial. The Education Office has supported access to education for poor students through social assistance at the PAUD, elementary, junior high, and non-formal levels. However, the Smart Sleman Program's primary focus, which emphasizes higher education, is more evident in the cross-regional scholarship scheme, particularly through the Social Services Agency. Therefore, the Education Agency's budget allocation can be considered quite appropriate in terms of equitable access to education, but it does not fully reflect the program's primary goal of ensuring at least one college degree for every poor family.

Keywords : Evaluasi Anggaran, Prioritas Pendidikan Daerah, Dinas Pendidikan, Akses Pendidikan, Beasiswa

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong mobilitas sosial masyarakat (Hendrizal et al., 2024; Yuliawati, 2025; Maesaroh et al., 2026). Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah atau tingginya angka partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin akses pendidikan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin (MM, 2022; Rusli, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan daerah perlu didukung oleh perencanaan anggaran yang selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen cukup kuat terhadap pembangunan pendidikan (Diyati & Muhyadi, 2014). Hal ini terlihat dari besarnya porsi belanja pendidikan dalam APBD selama beberapa tahun terakhir, yang secara konsisten berada pada kisaran lebih dari seperempat total belanja daerah. Pada tahun 2023 anggaran urusan pendidikan mencapai Rp866,01 miliar dengan realisasi Rp834,66 miliar atau 96,38 persen. Pada tahun 2024, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp946,75 miliar dengan realisasi Rp931,89 miliar atau 98,43 persen. Sementara pada tahun

2025, anggaran pendidikan kembali naik menjadi Rp965,02 miliar dengan realisasi Rp905,78 miliar atau 93,86 persen. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman.

Di antara berbagai kebijakan pendidikan daerah, Program Sleman Pintar menjadi salah satu program yang penting untuk diperhatikan (Iqbal et al., 2024). Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan merata, khususnya bagi keluarga miskin, rentan miskin, dan penerima Program Keluarga Harapan. Program tersebut dibangun dengan semangat "Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana," yaitu upaya agar setiap keluarga miskin di Sleman memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang dapat menempuh pendidikan tinggi. Dalam publikasi resmi pemerintah daerah dijelaskan bahwa program ini diwujudkan melalui pemberian beasiswa dan dukungan akses pendidikan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2024, misalnya, Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan beasiswa Sleman Pintar kepada 570 penerima dengan total anggaran sebesar Rp7,8 miliar. Pada tahun 2025, program ini kembali ditegaskan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

Secara substantif, Program Sleman Pintar tidak hanya berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga merepresentasikan arah kebijakan daerah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Artinya, program ini memiliki nilai strategis karena pendidikan ditempatkan sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam perspektif kebijakan publik, sebuah program prioritas seperti ini seharusnya tercermin secara nyata dalam struktur penganggaran perangkat daerah yang terkait, terutama Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana urusan pendidikan di daerah. Dengan demikian, evaluasi terhadap alokasi anggaran Dinas Pendidikan menjadi penting untuk melihat apakah komitmen normatif pemerintah daerah telah diterjemahkan secara memadai ke dalam kebijakan fiskal.

Persoalan utama yang muncul adalah bahwa besarnya anggaran pendidikan belum tentu otomatis menunjukkan kesesuaian dengan program prioritas tertentu (Hisyam & Siradjuddin, 2025). Anggaran pendidikan dapat saja terserap untuk kebutuhan rutin, belanja penunjang, operasional birokrasi, atau program lain yang tidak secara langsung menyentuh sasaran utama Program Sleman Pintar. Karena itu, yang perlu dievaluasi bukan sekadar jumlah anggaran pendidikan, melainkan bagaimana struktur anggaran tersebut diarahkan, siapa sasaran penerima manfaatnya, dan sejauh mana bentuk belanja yang ada benar-benar mendukung tujuan program prioritas daerah. Dalam hal ini, perhatian utama terletak pada apakah alokasi anggaran Dinas Pendidikan sudah berpihak pada peserta didik miskin dan mampu menjadi pijakan untuk mewujudkan cita-cita "satu keluarga miskin satu sarjana."

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa di dalam struktur anggaran Dinas Pendidikan memang terdapat belanja yang berkaitan langsung dengan akses pendidikan kelompok miskin, terutama melalui pos bantuan sosial. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp9,451 miliar dengan realisasi Rp8,476 miliar atau 89,69 persen. Selain itu, dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, bantuan sosial Dinas Pendidikan tercatat sebesar Rp8,9975 miliar yang dialokasikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin pada jenjang nonformal, PAUD, SD, dan SMP. Namun demikian, jika dicermati lebih jauh,

dukungan anggaran ini lebih banyak menyasar pendidikan dasar dan menengah pertama, sedangkan orientasi utama Program Sleman Pintar justru sangat kuat pada pendidikan tinggi. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan evaluatif mengenai tingkat kesesuaian antara alokasi anggaran Dinas Pendidikan dengan arah program prioritas daerah tersebut.

Secara akademik, penelitian mengenai evaluasi program beasiswa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai dari tersedia atau tidaknya anggaran, tetapi juga harus dilihat dari ketepatan sasaran, keterhubungan antara tujuan program dan implementasi, serta efektivitas tata kelola pelaksanaannya. Penelitian evaluatif terhadap program beasiswa di berbagai daerah juga menekankan pentingnya menilai keselarasan antara dokumen kebijakan, penganggaran, dan hasil yang ingin dicapai. Karena itu, penelitian tentang kesesuaian alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Program Sleman Pintar menjadi relevan, baik secara praktis untuk perbaikan kebijakan daerah maupun secara akademik untuk memperkaya kajian evaluasi kebijakan pendidikan berbasis anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada evaluasi kesesuaian alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Program Sleman Pintar sebagai program prioritas pendidikan daerah. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran apakah anggaran pendidikan yang besar di Kabupaten Sleman sudah benar-benar diarahkan untuk mendukung kelompok sasaran prioritas, sekaligus menunjukkan apakah visi “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” telah tercermin dalam struktur belanja pendidikan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan anggaran, tetapi juga menilai makna dan arah kebijakan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Program Sleman Pintar sebagai program prioritas pendidikan daerah? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman, mengidentifikasi pos anggaran yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan tujuan Program Sleman Pintar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara kebijakan, dokumen anggaran, dan arah program prioritas daerah, bukan sekadar menghitung jumlah anggaran secara statistik. Melalui pendekatan ini, data anggaran tidak diperlakukan hanya sebagai angka, tetapi juga sebagai representasi dari prioritas kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, desain evaluatif deskriptif digunakan karena penelitian ini ingin menggambarkan kondisi nyata alokasi anggaran, lalu menilai tingkat kesesuaiannya dengan tujuan Program Sleman Pintar. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi data, tetapi juga melakukan penilaian terhadap keselarasan antara anggaran dan program prioritas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kebijakan berbasis studi dokumen. Fokus utamanya adalah menelaah dokumen resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan

anggaran pendidikan dan pelaksanaan Program Sleman Pintar. Penelitian tidak dilakukan melalui survei atau wawancara lapangan, melainkan melalui analisis mendalam terhadap dokumen yang memiliki kekuatan formal sebagai dasar kebijakan dan pelaksanaan program. Pemilihan studi dokumen dinilai tepat karena objek yang dikaji berupa arah kebijakan fiskal, struktur program, dan bukti formal alokasi anggaran dalam dokumen pemerintahan.

Objek dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dikaitkan dengan Program Sleman Pintar sebagai program prioritas pendidikan daerah. Subjek kajian bukan individu, melainkan dokumen-dokumen kebijakan dan keuangan yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan merealisasikan belanja pendidikan. Dengan demikian, unit analisis penelitian ini adalah isi dokumen, terutama yang memuat informasi tentang besaran anggaran, realisasi anggaran, jenis belanja, sasaran penerima manfaat, serta narasi resmi tujuan program.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dokumen dan data pendukung. Data primer dokumen diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu:

1. RLPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023
2. RLPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024
3. RLPPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pagu anggaran, realisasi belanja, struktur program, serta rincian bantuan sosial di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Program Sleman Pintar, khususnya berita resmi yang menjelaskan tujuan program, sasaran penerima manfaat, dan arah kebijakan “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.”

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat bagian-bagian penting dari dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup besarnya anggaran urusan pendidikan, realisasi belanja pendidikan, proporsi anggaran pendidikan dalam APBD, rincian bantuan sosial Dinas Pendidikan, sasaran bantuan pendidikan, dan narasi kebijakan Program Sleman Pintar. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu memberikan bukti tertulis yang relatif stabil, resmi, dan dapat ditelusuri ulang sehingga cocok digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan publik.

Untuk memperjelas arah penelitian, fokus evaluasi dalam penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama. Pertama, kesesuaian tujuan, yaitu menilai apakah arah alokasi anggaran Dinas Pendidikan sejalan dengan tujuan Program Sleman Pintar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Kedua, kesesuaian bentuk anggaran, yaitu menilai apakah terdapat pos belanja yang secara langsung mendukung kelompok sasaran program, seperti bantuan sosial pendidikan atau bantuan biaya pendidikan. Ketiga, kesesuaian sasaran, yaitu menilai apakah penerima manfaat anggaran benar-benar berasal dari kelompok miskin dan rentan miskin sebagaimana menjadi target Program Sleman Pintar.

Tiga fokus ini dipilih agar evaluasi tidak terlalu luas, tetapi tetap mampu menjelaskan hubungan antara anggaran dan program prioritas secara utuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, misalnya data tentang anggaran pendidikan, bantuan sosial, dan sasaran program. Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dipilih disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar hubungan antar data menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan data tersebut untuk menentukan apakah alokasi anggaran Dinas Pendidikan dapat dinilai sesuai, cukup sesuai, atau belum sesuai dengan Program Sleman Pintar. Dengan cara ini, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif.

Dalam penelitian ini, indikator penilaian kesesuaian disusun secara sederhana agar sesuai dengan karakter desain evaluatif deskriptif. Kategori sesuai diberikan apabila ditemukan hubungan yang jelas antara arah program dan pos anggaran yang mendukung sasaran prioritas. Kategori cukup sesuai diberikan apabila dukungan anggaran ada, tetapi belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan utama program. Sementara kategori belum sesuai diberikan apabila alokasi anggaran tidak menunjukkan kaitan yang memadai dengan program prioritas. Penggunaan kategori ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian tanpa menghilangkan kedalaman analisis kualitatif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi dokumen. Artinya, data dari satu dokumen dibandingkan dengan dokumen lain agar diperoleh gambaran yang lebih konsisten. Misalnya, data pagu dan realisasi anggaran dibandingkan antara RLPPD dan laporan keuangan daerah, sedangkan tujuan program diverifikasi melalui publikasi resmi pemerintah daerah. Triangulasi ini penting untuk mengurangi bias penafsiran dan memastikan bahwa kesimpulan penelitian benar-benar didasarkan pada bukti dokumen yang saling menguatkan.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana anggaran pendidikan di Kabupaten Sleman disusun dan sejauh mana alokasi tersebut mendukung Program Sleman Pintar. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinkronisasi antara program prioritas dan kebijakan penganggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Program Sleman Pintar

Program Sleman Pintar merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin, rentan miskin, dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang tidak hanya sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan di daerah.

Namun demikian, jika dilihat dari dokumen resmi dan arah kebijakan yang berkembang, orientasi utama Program Sleman Pintar cenderung lebih kuat pada pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari narasi “satu keluarga miskin satu sarjana” yang menjadi fokus utama pemerintah daerah. Di sisi lain, implementasi program justru melibatkan berbagai perangkat daerah, terutama Dinas Sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tidak sepenuhnya berada dalam satu struktur kelembagaan yang terintegrasi.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai adanya pembagian peran antar perangkat daerah. Namun, di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara arah kebijakan dan implementasi di tingkat organisasi. Oleh karena itu, ketika evaluasi difokuskan pada Dinas Pendidikan, maka perlu dipahami bahwa peran yang dijalankan lebih pada penguatan akses pendidikan dasar dan menengah, bukan keseluruhan tujuan program.

Tren Anggaran Pendidikan Kabupaten Sleman

Dalam tiga tahun terakhir, anggaran urusan pendidikan di Kabupaten Sleman selalu menempati porsi besar dalam APBD. Pada tahun 2023, anggaran urusan pendidikan sebesar Rp866,01 miliar dengan realisasi Rp834,66 miliar atau 96,38 persen. Pada tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp946,75 miliar dengan realisasi Rp931,89 miliar atau 98,43 persen. Pada tahun 2025, anggaran kembali naik menjadi Rp965,02 miliar dengan realisasi Rp905,78 miliar atau 93,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi salah satu bidang prioritas dalam belanja daerah.

Tabel 1. Tren Anggaran Urusan Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2023-2025

Tahun	Anggaran urusan pendidikan	Realisasi	Presenta-se realisasi
2023	Rp866,01 Miliar	Rp834,66 Miliar	96,38%
2024	Rp946,75 Miliar	Rp931,89 Miliar	98,43%
2025	Rp965.02 Miliar	Rp905,78 Miliar	905,78%

Sumber: *RLPPD Kabupaten Sleman Tahun 2023, 2024, dan 2025.*

Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal daerah. Bahkan, jika dilihat dari proporsinya terhadap total belanja daerah, anggaran pendidikan berada pada kisaran 26–28 persen. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Namun, dalam perspektif evaluasi program, besarnya anggaran tidak serta merta menunjukkan kesesuaian dengan tujuan program. Yang lebih penting adalah bagaimana struktur anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sasaran kebijakan secara spesifik. Dengan kata lain, efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari jumlah dan tingkat realisasi, tetapi juga dari ketepatan alokasi terhadap tujuan program.

Bukti yang paling dekat dengan tujuan pemerataan akses pendidikan dalam Dinas Pendidikan terlihat pada belanja bantuan sosial. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp9,451 miliar dengan realisasi Rp8,476 miliar atau 89,69 persen. Sementara itu, dalam Penjabaran APBD Tahun 2025, bantuan sosial Dinas Pendidikan tercatat sebesar Rp8,9975 miliar dan secara eksplisit ditujukan kepada peserta didik miskin/rentan miskin pada jenjang nonformal, PAUD, SD, dan SMP.

Tabel 2. Rincian Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2025

Sasaran bantuan sosial	Anggaran
Nonformal/Kesetaraan	Rp398 juta
PAUD	Rp1,1 miliar
Sekolah Dasar	Rp4,5 miliar
SMP	Rp3 miliar
Total	Rp8,9975 miliar

Sumber: *Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.*

Jika ditinjau lebih rinci, dukungan Dinas Pendidikan terhadap pemerataan akses pendidikan terlihat melalui belanja bantuan sosial. Pada tahun 2024, anggaran bantuan sosial sebesar Rp9,451 miliar dengan realisasi 89,69 persen. Sementara pada tahun 2025, alokasi bantuan sosial sebesar Rp8,9975 miliar yang ditujukan bagi peserta didik miskin dan rentan miskin pada jenjang nonformal, PAUD, SD, dan SMP.

Data ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran yang berpihak pada kelompok sasaran program, khususnya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar. Dukungan ini penting sebagai fondasi awal dalam memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah.Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kesesuaian ini masih belum penuh. Hal ini karena bantuan sosial Dinas Pendidikan lebih banyak diarahkan pada peserta didik PAUD, SD, SMP, dan nonformal, sedangkan orientasi utama Program Sleman Pintar justru lebih kuat pada beasiswa pendidikan tinggi. Dalam publikasi resmi Pemkab Sleman, tujuan program sangat jelas, yaitu membantu anak dari keluarga miskin agar bisa melanjutkan kuliah. Karena itu, dukungan Dinas Pendidikan lebih tepat dipahami sebagai dukungan pada jalur awal menuju cita-cita program, bukan keseluruhan program itu sendiri.

Tingkat Kesesuaian Alokasi Anggaran dengan Program Sleman Pintar

Jika ditinjau dari sudut evaluatif, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman cukup sesuai dengan Program Sleman Pintar dalam aspek pemerataan akses pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya anggaran bantuan sosial yang secara jelas menyasar peserta didik miskin dan rentan miskin. Selain itu, secara umum realisasi

anggaran pendidikan di Sleman juga tergolong tinggi, yang menunjukkan adanya kapasitas pelaksanaan anggaran yang baik.

Akan tetapi, jika dilihat dari tujuan utama program, yaitu “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana,” maka kesesuaiannya masih bersifat parsial. Program Sleman Pintar yang berkaitan langsung dengan pendidikan tinggi lebih banyak tampak pada skema beasiswa yang dikelola lintas perangkat daerah dan dipublikasikan melalui Dinas Sosial. Artinya, struktur anggaran Dinas Pendidikan belum secara langsung merepresentasikan keseluruhan arah Program Sleman Pintar, terutama pada dimensi pendidikan tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara arah kebijakan dan struktur anggaran. Secara kebijakan, pemerintah daerah sudah memiliki visi yang kuat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun secara anggaran, dukungan terhadap visi tersebut masih tersebar di beberapa perangkat daerah, sehingga ketika evaluasi difokuskan pada Dinas Pendidikan saja, yang tampak baru sebatas dukungan pada pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah pertama. Dengan kata lain, Dinas Pendidikan berperan penting sebagai penyangga awal, tetapi belum menjadi cermin penuh dari program Sleman Pintar secara keseluruhan.

Selain itu, realisasi belanja bantuan sosial Dinas Pendidikan pada tahun 2024 yang berada di angka 89,69 persen juga menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konteks evaluasi program, realisasi yang belum maksimal dapat mengindikasikan adanya kendala administratif, verifikasi sasaran, atau proses penyaluran. Padahal, ketepatan sasaran dan kelancaran penyaluran menjadi hal yang sangat penting dalam program yang ditujukan untuk keluarga miskin.

Tabel 3. Matriks Evaluasi Kesesuaian

Aspek Evaluasi	Temuan	Penilaian
Kesesuaian tujuan	Dinas Pendidikan mendukung akses pendidikan bagi peserta didik miskin	Sesuai
Kesesuaian bentuk anggaran	Ada bantuan sosial bagi peserta didik miskin/rentan miskin	Sesuai
Kesesuaian sasaran program	Menyasar PAUD, SD, SMP, dan nonformal	Sesuai
Kesesuaian dengan tujuan “satu sarjana”	Dukungan pendidikan tinggi lebih banyak berada di luar struktur utama Dinas Pendidikan	Belum optimal
Keterlaksanaan anggaran	Realisasi bansos 2024 belum maksimal	Cukup sesuai

Berdasarkan hasil analisis, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup sesuai dalam mendukung Program Sleman Pintar, khususnya pada aspek pemerataan akses pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya program bantuan sosial yang secara jelas menyasar kelompok miskin dan rentan miskin, serta tingginya tingkat realisasi anggaran.

Namun, jika dilihat dari tujuan utama program yaitu “satu keluarga miskin satu sarjana”, maka tingkat kesesuaiannya masih bersifat parsial. Dukungan terhadap pendidikan tinggi belum sepenuhnya tercermin dalam struktur anggaran Dinas Pendidikan, melainkan lebih banyak dikelola melalui perangkat daerah lain.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan implementasi anggaran. Secara normatif, pemerintah daerah telah memiliki visi yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Akan tetapi, secara operasional, dukungan anggaran masih tersebar sehingga belum sepenuhnya mencerminkan integrasi program.

Selain itu, realisasi anggaran bantuan sosial yang belum mencapai 100 persen juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program. Dalam konteks evaluasi, hal ini dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam proses administratif, verifikasi penerima, maupun mekanisme penyaluran. Padahal, dalam program yang menyasar kelompok rentan, ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman telah menunjukkan keberpihakan terhadap peserta didik miskin dan rentan miskin, terutama melalui bantuan sosial pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan nonformal. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan semangat Program Sleman Pintar dalam aspek pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama Program Sleman Pintar yang menekankan pendidikan tinggi dengan semangat “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.” Arah tersebut lebih banyak tampak dalam pelaksanaan program lintas perangkat daerah, terutama melalui Dinas Sosial. Oleh sebab itu, jika evaluasi difokuskan pada Dinas Pendidikan, maka hasilnya menunjukkan kesesuaian yang bersifat parsial.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memperkuat integrasi antara kebijakan program prioritas dan struktur anggaran lintas perangkat daerah, sehingga Program Sleman Pintar dapat ditelusuri lebih jelas dalam dokumen anggaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial agar dukungan terhadap peserta didik miskin benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan besar program tidak berhenti pada akses sekolah dasar dan menengah, tetapi benar-benar bermuara pada lahirnya sarjana dari keluarga miskin di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, D., Wahyu, P. G., Muhammad, F. M., & Suci, M. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Kompetensi Mahasiswa. Publika, 13(2), 457–466

Banurea, P. I., & Sihombing, R. S. M. (2024). Evaluasi Program Beasiswa Berprestasi Di Kabupaten Pakpak Bharat. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Diyati, H., & Muhyadi, M. (2014). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 2*(1), 28–43.

Hendrizal, H., Joni, M., Hijrat, K., Wandi, J. I., & Afnita, N. (2024). Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *El-Kahfi: Journal Of Islamic Economics, 5*(01), 81–90.

Hisyam, M., & Siradjuddin, S. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan: Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Kualitas Outputnya. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2*(1), 21–27.

Iqbal, A., Yusdani, Y., & Harahap, S. A. R. (2024). Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1), 522–531.

Irianto, H., Nurany, F., & Puteri, A. P. (2024). Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara.

Laia, A., Telaumbanua, N., & Nainggolan, M. F. (2021). Mekanisme Dan Persyaratan Beasiswa Daerah. Jurnal Abdimas Mutiara, 2(1), 226–236.

Maesaroh, S., Ratnaningsih, S., & Nurochim, N. (2026). Pendidikan Sebagai Investasi Modal SDM: Analisis Nilai, Dampak Sosial-Ekonomi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 129–136.

MM, L. (2022). *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan*. *Buku Karya Dosen IKIP PGRI Wates, 1*.

Panggabean, V. E., Qomarina, N. N., Sinambela, A., & Sidauruk, V. M. (2024). Evaluasi Efektivitas Beasiswa KIP Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Mahasiswa. RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 4(4).

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2023). RLPPD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2024). Peraturan Bupati Sleman Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2024). RLPPD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2024). Serahkan Program Beasiswa Sleman Pintar, Bupati Sleman Dorong Anak Muda Sleman Raih Masa Depan Lebih Baik.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). RLPPD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2025). Wakil Bupati Sleman Hadiri Pertemuan Orang Tua Dan Penerima Beasiswa Sleman Pintar.

Primayudha, F. A., & Prakoso, C. T. (2025). Pengelolaan Program Beasiswa Kutim Tuntas Kategori Mahasiswa Oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Administrasi Publik, 13(2), 457–466.

Rusli, R. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Takalar Tahun 2021–2023* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Tabuni, N., Satyawati, S. T., & Ismanto, B. (2024). Evaluasi Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang Menggunakan Model Goal Oriented Evaluation. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(2), 245–259.

Yuliawati, I. (2025). Peran Kebijakan Pendidikan Dalam Memperluas Mobilitas Sosial Masyarakat Melalui Penguatan Pemerataan Dan Dukungan Pembelajaran. *Jurnal Mahasiswa Sosial Humaniora, 2*(2).